



BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024, ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Simalungun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.781.171.448.903,00
b. Belanja Daerah	Rp. 2.803.671.448.903,00
Defisit/Surplus	Rp. -22.500.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 30.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 7.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 22.500.000.000,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.781.171.448.903,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah) yang bersumber dari:

- Pendapatan Asli Daerah ;
- Pendapatan Transfer; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 194.394.039.424,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas:

a. pajak daerah	Rp. 129.452.316.354,00
b. retribusi daerah	Rp. 4.567.627.145,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	Rp. 19.524.495.679,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Rp. 40.849.600.246,00

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.547.446.208.479,00 (dua triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp. 2.444.262.422.000,00
b. pendapatan transfer antar daerah.	Rp. 103.183.786.479,00

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.331.201.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah) adalah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.803.671.448.903,00 (dua triliun delapan ratus tiga miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.985.140.729.090,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| a. belanja pegawai | Rp.1.107.507.146.494,00 |
| b. belanja barang dan jasa | Rp. 776.142.390.496,00 |
| c. belanja hibah | Rp. 101.061.766.300,00 |
| d. belanja Bantuan Sosial | Rp. 429.425.800,00 |

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.306.958.363.913,00 (tiga ratus enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. belanja modal peralatan dan mesin | Rp. 96.051.538.433,00 |
| b. belanja modal gedung dan bangunan | Rp. 79.435.794.059,00 |
| c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | Rp.110.030.776.942,00 |
| d. belanja modal aset tetap lainnya. | Rp. 21.245.254.479,00 |
| e. belanja modal aset lainnya | Rp. 195.000.000,00 |

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 491.572.355.900,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) terdiri atas :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a. belanja bagi hasil | Rp. 158.597.685.900,00 |
| b. belanja bantuan keuangan. | Rp. 332.974.670.000,00 |

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) adalah Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp -22.500.000.000,00 (defisit dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan.
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan .
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 18

Bupati Simalungun menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 4 Januari 2024
BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIPOH HASIROLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 4 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

ESRON SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 638





KABUPATEN SIMALUNGUN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	194.394.039.424,00
4.1.01	Pajak Daerah	129.452.316.354,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	10.800.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	10.800.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	10.800.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	100.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.600.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.600.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.600.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	40.500.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	40.500.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	40.500.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	264.136.950,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	264.136.950,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	264.136.950,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.339.329.062,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	4.339.329.062,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.339.329.062,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.500.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.500.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	43.576.563.953,00
4.1.01.15.01	PBBP2	43.576.563.953,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	43.576.563.953,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22.272.286.389,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	22.272.286.389,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	22.272.286.389,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.567.627.145,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.345.549.738,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	66.631.267,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	66.631.267,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	566.153.605,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	566.153.605,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	630.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	630.000.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.050.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.050.000.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	17.666.130,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	17.666.130,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.098.736,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.098.736,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.110.408.107,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	385.157.274,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	7.567.561,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	377.589.713,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	467.469.041,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	467.469.041,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	235.292.556,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	235.292.556,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	22.489.236,00
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	22.489.236,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.111.669.300,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	157.500.000,00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	157.500.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	27.562.500,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	27.562.500,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	926.606.800,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	926.606.800,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.524.495.679,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	19.524.495.679,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.524.495.679,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.524.495.679,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.849.600.246,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	110.551.761,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	39.608.801,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	39.608.801,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	70.942.960,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	70.942.960,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	541.208.750,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	541.208.750,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	541.208.750,00
4.1.04.05	Jasa Giro	9.351.387.657,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.146.917.450,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.146.917.450,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.043.805.853,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.043.805.853,00
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	467.836,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	467.836,00
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	1.160.196.518,00
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	1.160.196.518,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	9.094.272.119,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.094.272.119,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.094.272.119,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	91.520.330,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	91.520.330,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	91.520.330,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	660.659.629,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	29.053.918,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	29.053.918,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	5.716.072,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.716.072,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	89.408,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	89.408,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.483.851,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	5.483.851,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.244,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.244,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	125.533,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	125.533,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.476.661,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	17.476.661,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	602.711.942,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	602.711.942,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	21.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	21.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	21.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.547.446.208.479,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.444.262.422.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.111.287.752.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	84.906.919.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	32.159.872.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	15.214.992.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	33.363.356.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.087.706.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	69.227.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.562.561.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	375.394.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.073.811.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.451.560.802.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.451.560.802.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	216.876.342.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	793.563.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	29.336.971.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	18.763.616.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	44.227.097.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	25.823.421.000,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	6.418.984.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	62.406.750.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	10.741.523.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.498.349.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	11.575.000.000,00
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.291.068.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	357.943.689.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	122.015.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	154.028.195.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.458.815.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	7.217.400.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	471.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	510.129.000,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa	1.838.000.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	630.644.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	66.151.146.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	650.000.000,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	332.974.670.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	332.974.670.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	332.974.670.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.183.786.479,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	103.183.786.479,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	103.183.786.479,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	36.296.291.200,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.135.944.283,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.216.676.478,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.944.927.755,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	34.589.946.763,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.331.201.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	39.331.201.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	39.331.201.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	39.331.201.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	39.331.201.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.781.171.448.903,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.985.140.729.090,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.107.507.146.494,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	808.036.039.406,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	598.054.488.344,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	433.013.061.776,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	165.041.426.568,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	59.625.601.805,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	39.024.943.109,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	20.600.658.696,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.318.700.995,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	10.318.700.995,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	51.981.892.480,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	30.848.662.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21.133.230.480,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.801.151.430,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.693.858.830,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	107.292.600,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	36.784.808.084,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	22.209.547.297,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14.575.260.787,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	852.103.942,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	852.103.942,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.653.062,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.785.515,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	867.547,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	40.908.061.692,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	32.752.609.108,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.155.452.584,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.518.992.121,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.123.050.946,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	395.941.175,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.182.585.451,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.994.815.829,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.187.769.622,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	261.664.567.154,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	106.650.660.154,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	106.650.660.154,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	154.028.195.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	154.028.195.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	985.712.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	985.712.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.285.457.761,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.631.298.341,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	540.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	125.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	80.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.025.000.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	216.966.453,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	175.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.634.121.148,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	835.210.740,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	108.690.000,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	108.690.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.742.929.420,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.742.929.420,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	802.540.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	252.300.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.240.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.478.559.173,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.408.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.408.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	146.708.100,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	146.708.100,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	66.868.200,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	66.868.200,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.575.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.575.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	556.600.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	556.600.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.234.713.473,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	123.956.868,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	46.700.329,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	58.376.276,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.005.680.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.395.040.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.395.040.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	190.523.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.060.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.060.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.299.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.299.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.108.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.108.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.691.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.691.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	768.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	768.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.018.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.018.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	144.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	144.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	432.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	432.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	776.142.390.496,00
5.1.02.01	Belanja Barang	202.787.721.582,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	202.756.481.022,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.508.124.400,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	980.702.380,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.957.065.307,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.672.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.781.709.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.822.200,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	132.240.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	470.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	85.908.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.400.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.749.889.535,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	668.727.350,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	200.000.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	61.200.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	56.414.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.085.838.993,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.016.690.987,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.182.758.254,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	141.043.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.929.865.530,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.129.472.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	976.328.305,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	933.204.600,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.120.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.264.788.180,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.804.755.800,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	12.339.937.414,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.984.057.582,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	43.187.894.308,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	53.634.741.508,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	500.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.740.656.600,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	137.370.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.621.108.399,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.871.923.990,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	56.486.100,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.836.053.500,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	178.198.100,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	600.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	75.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	473.145.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	642.988.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	41.650.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	578.916.200,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.600.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	95.013.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	31.240.560,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	31.240.560,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	278.768.342.260,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	160.922.271.462,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.776.403.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.753.567.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	976.800.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	7.514.230.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	180.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	8.700.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	92.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.620.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	31.331.828.400,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	745.500.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	102.700.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	200.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	885.600.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	16.250.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.500.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	31.200.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.584.683.340,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.202.944.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.970.375.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	402.744.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	216.000.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	360.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	11.840.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.178.800.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	155.800.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	229.940.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.276.830.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	640.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	656.973.520,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	11.900.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.471.065.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	124.007.147,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.188.312.720,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	29.271.016.800,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	374.612.100,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.584.048.420,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	15.594.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.033.879.015,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.356.278.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	330.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	56.568.849.600,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	36.120.000.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.889.600.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.263.011.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.414.287.680,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.881.950.720,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	64.217.108,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	64.217.108,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.624.290.700,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	9.615.900,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.842.689.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.118.471.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	272.000.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	32.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.944.989.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.235.133.200,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.227.912.600,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	236.480.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	21.000.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	183.600.000,00
5.1.02.02.04.0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	2.500.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.043.986.580,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.129.600.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	40.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	874.386.580,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.616.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.06.0008	Belanja Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang	7.616.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	1.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.485.707.002,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	9.950.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.600.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	89.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	900.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.748.600.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	815.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	2.250.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	52.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3.681.934.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.190.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.339.800.000,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	509.423.002,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.479.659.200,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	649.167.000,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	13.250.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	102.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	940.242.200,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	775.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	218.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	72.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	146.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.352.744.608,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	22.422.744.608,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.930.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	81.100.275.911,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.707.444.000,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	44.063.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	97.931.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	65.412.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	85.670.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.093.642.200,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	98.916.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	10.233.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	401.640.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	435.550.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	457.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	35.386.800,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	408.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	273.000.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	151.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.049.267.260,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	58.672.778.000,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	60.000.000,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	1.304.489.260,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	12.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.343.564.651,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	5.063.564.651,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.200.000.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	80.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	111.401.874.127,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.401.874.127,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.854.742.950,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72.684.201.657,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.349.464.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.513.465.520,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.233.475.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.850.875.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.951.875.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	189.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.170.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	540.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.382.600.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.382.600.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.850.701.616,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.850.701.616,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.850.701.616,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.000.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.000.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	101.061.766.300,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	59.507.220.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	59.507.220.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	59.507.220.000,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	2.000.000.000,00
5.1.05.04.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	2.000.000.000,00
5.1.05.04.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	2.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.323.818.300,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.280.150.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.031.400.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	248.750.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.243.668.300,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.243.668.300,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.800.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.800.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	21.420.400.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	21.420.400.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	21.420.400.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.810.328.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.810.328.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.810.328.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	429.425.800,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	429.425.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	429.425.800,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	429.425.800,00
5.2	BELANJA MODAL	306.958.363.913,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.051.538.433,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.347.386.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.297.386.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	2.214.450.000,00
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	1.077.810.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	5.126.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	50.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	50.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	13.631.133.540,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	13.447.905.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.576.335.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.844.130.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	360.700.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.953.000.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	713.740.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	183.228.540,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	23.436.540,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	159.792.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	252.642.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	252.642.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	178.500.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	33.118.000,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	24.908.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	16.116.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	28.745.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	28.745.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	6.885.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	21.860.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.263.653.803,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.390.189.463,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	122.354.253,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.267.835.210,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19.546.025.940,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	18.300.924.896,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	61.751.720,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	83.680.620,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	132.263.400,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	901.615.304,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	65.790.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.327.438.400,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	82.824.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	13.056.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	11.781.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	2.295.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	2.217.482.400,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	484.063.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	359.713.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	100.813.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	189.800.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	69.100.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	124.350.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	124.350.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	25.067.766.108,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	23.255.641.088,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.793.577.920,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	2.282.504.400,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	8.260.910.000,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	1.055.367.437,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	449.000.000,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	117.494.000,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.192.783.000,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	315.590.000,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	234.104.900,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	279.922.500,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	198.231.900,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	2.156.197.631,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	903.433.400,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	16.524.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.812.125.020,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.812.125.020,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.220.109.320,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	754.119.000,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	460.000.000,00
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	252.480.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	25.000.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	16.639.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	5.422.320,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	2.856.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	2.566.320,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	40.500.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	40.500.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.420.068.000,00
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	1.420.068.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	8.843.101.053,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	7.622.825.043,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	709.226.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.445.871.628,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.467.727.415,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.220.276.010,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	203.714.400,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	6.281.610,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.010.280.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	440.776.200,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	440.776.200,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	440.776.200,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2.136.040.618,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	2.136.040.618,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	191.040.742,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	1.944.999.876,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.570.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	3.570.000,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	3.570.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	4.704.500,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4.704.500,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	4.704.500,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.344.849.634,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.344.849.634,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	75.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	3.269.849.634,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	16.913.600,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	16.913.600,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	14.445.200,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	2.468.400,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.966.084.057,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.966.084.057,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.966.084.057,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.435.794.059,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	71.536.994.059,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	71.536.994.059,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	249.417.800,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	20.309.636.998,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	45.054.396.520,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.172.500.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	204.000.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	304.292.741,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.242.750.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.398.800.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	7.398.800.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	7.398.800.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.030.776.942,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	95.163.138.942,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	95.163.138.942,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	93.563.138.942,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.600.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.466.260.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	11.266.260.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	11.266.260.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.200.000.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.200.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.401.378.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	542.500.000,00
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	542.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	444.878.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	444.878.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	414.000.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	414.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.245.254.479,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	314.622.052,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	314.622.052,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	291.720.821,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	10.721.268,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	12.179.963,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	152.818.100,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	137.020.600,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	137.020.600,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	15.797.500,00
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	10.710.000,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	5.087.500,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	20.777.814.327,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	20.777.814.327,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	20.777.814.327,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	195.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	195.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	195.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	195.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	491.572.355.900,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	158.597.685.900,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	158.597.685.900,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	158.597.685.900,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	158.597.685.900,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	332.974.670.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	332.974.670.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	332.974.670.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	332.974.670.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	2.803.671.448.903,00
	Total Surplus/(Defisit)	-22.500.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	30.000.000.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	30.000.000.000,00
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	30.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	22.500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00